

Rudi Ajak Dokter Bangun Batam

- ▶ Buka Acara IDI di Hotel Swiss Bell
- ▶ Pertemuan Ilmiah Tahunan

BATAM, TRIBUN - Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kepulauan Riau mengadakan pertemuan ilmiah tahunan di Hotel Swiss Bell Harbourbay. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan medik yang profesional menuju *Universal Health Coverage* 2018.

"Tujuan acara ini untuk transfer ilmu. Kita berharap transfer ilmunya bagus dan bisa dipraktikkan. Mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu dokter, tak ada lagi pasien yang ke luar negeri," kata Ketua IDI wilayah Provinsi Kepri, dr Rusdani dalam kata sambutannya, Kamis (12/4).

Rusdani mengatakan, acara ini juga bekerjasama dengan berbagai pihak. Dan harapannya semoga kerjasama ini bisa berlangsung berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dr Sulastri menjelaskan, dokter merupakan profesi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tujuan dokter memberikan kesehatan yang dibutuhkan oleh setiap orang.

Ia mengharapkan, wadah IDI bisa memberikan manfaat yang sangat besar. Pertemuan pertama IDI seluruh wilayah Indonesia 2018 diadakan di Kalimantan Timur. Kemungkinan ada 30 ribu peserta yang menghadiri pertemuan tersebut.

"Semoga kedepan Kepri bisa menjadi tuan rumah. IDI juga diharapkan bisa membantu Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dan kami juga meminta kepada peme-

rintah untuk mengurus izin prakteknya agar bisa ditempatkan di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan," ujarnya.

Pantauan *Tribun*, acara ini juga dihadiri oleh Ketua PB IDI Pusat, Prof Ilham Oetama Marsis Sp. OG, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Kepulauan Riau, dr Rusdani Mkk, Ketua Unit Cabang, dr Soritua, Direktur Rumah Sakit Umum atau Swasta, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan lain sebagainya. Acara pemukulan gong pembuka langsung dilakukan bersama Rudi.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan dalam kata sambutannya setiap acara dokter, ia selalu meluangkan waktu untuk hadir. Ia tidak ikhlas kalau masyarakat Batam masih pergi berobat ke Johor, Singapura, dan negara lain sebagainya.

"Kita tak bosan-bosan mengatakan bahwa begitu besar jumlah masyarakat kita yang berobat dan menghabiskan uangnya di sana. Pemko punya lahan. Dokter ayo sama-sama kita membangun Batam. Apalagi kita sekarang lagi membangun kota Pariwisata. Ayo Bapak, Ibu. Ketika mereka mengunjungi Batam mereka juga membutuhkan dokter untuk kesehatan mereka," papar Rudi.

Sementara, lanjut Rudi untuk mengembalikan Batam ke kota industri, tidak semudah itu. Butuh waktu dan proses. Karena regulasi selama ini sulit, makanya para investor kembali ke negaranya. Namun kesalahan

ini harus diperbaiki.

"Kita tunggu 3 atau tahun 4 kali. Yang penting pariwisata kita hidupkan, peran dokter sangat penting. Kita harus siap. Peran bapak ibu sangat penting bagi kami," ucapnya.

Ia menambahkan bagi anak-anak Batam yang lolos masuk ke beberapa universitas seperti UI, UGM, ITB, dan lainnya, akan di biayai oleh Pemko Batam. Namun harus sign kontrak, agar mereka kembali lagi ke Batam dan mengabdikan untuk Batam.

"Saya berharap kehebatan Malaysia bisa kita balikan ke Kota Batam. Dalam mengembangkan pariwisata saya membenarkan infrastruktur jalan. Tolong bantu saya untuk sama-sama menjaga Kota Batam dari tindakan anarkis. Saya ingin dalam waktu dekat ekonomi harus bertahan. Tidak ada kepentingan Rudi sebagai wali kota tapi namun untuk masyarakat," paparnya.

Rudi juga menawarkan kepada IDI apabila ada rencana ingin bangun rumah sakit, ia mengajak untuk duduk bersama. Dan akan dibahas secara bersama.

"Apa saja yang harus Pemko siapkan. Dan sumber daya manusianya, IDI yang siapkan. Kita tak perlu lagi berobat ke luar negeri lagi, cukup di Kota Batam saja," tuturnya.

Setelah pemukulan gong acara dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta dokter yang hadir. Dimana narasumbernya telah disediakan yang profesional dan berkompeten. (rus)



FOTO BERSAMA - Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat foto bersama dengan para dokter saat acara pertemuan ilmiah tahunan di Hotel Swiss Bell Harbourbay, Kamis (12/4).

14 Pejabat Ikut Program BKN

BATAM, TRIBUN - Sebanyak 14 pejabat eselon III Pemerintah Kota Batam akan mengikuti talent pool di Badan Kepegawainan Negara (BKN) Regional XII Pekanbaru, pekan depan. Talent pool ini merupakan program BKN dalam upaya pemetaan potensi melalui penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kaderisasi jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintahan.

"Tapi bukan berarti talent pool ini menggugurkan atau membatalkan open bidding (seleksi terbuka)," kata Wali Kota Batam, Rudi, Kamis (12/4) sebagaimana dikutip dari laman Media Center Batam.

Menurut Rudi, talent pool ini bertujuan untuk menjaring pegawai yang berpotensi mengisi jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, seperti Kepala Dinas dan Kepala Badan. Tapi bukan menjadi keharusan bagi kepala daerah untuk memaknai hasil kegiatan tersebut.

Tapi bukan berarti talent pool ini menggugurkan atau membatalkan open bidding (seleksi terbuka)

RUDI
Wali Kota Batam

"Boleh juga saya gunakan. Kalau saya mau meringkas, bisa langsung saja. Tidak digunakan assessment test (uji kepatutan). Terserah saya," ujarnya.

Rudi mengatakan talent pool ini tidak dibiayai pemerintah daerah. Jadi bisa juga untuk menghemat pengeluaran pemerintah dari sisi seleksi kepegawainan. Karena untuk melaksanakan open

bidding atau assessment test membutuhkan biaya.

"Kalau assessment kan biaya kita lagi. Selain itu juga butuh waktu. Jadi mungkin saja hasil talent pool ini kita gunakan. Contohnya untuk mengisi yang mau pensiun," kata dia.

Pada situs resmi bkn.go.id dijelaskan bahwa hasil penilaian ini sebagai informasi tentang kader-kader potensial (talent pool) dalam hal potensi dan kompetensi untuk mengisi kebutuhan JPT melalui seleksi terbuka. Oleh karena itu, Pusat Penilaian Kompetensi ASN dapat memfasilitasi penilaian potensi dan kompetensi JPT guna penyusunan talent pool, dilanjutkan dengan pengembangan JPT oleh instansi terkait.

"Pada akhirnya dapat diperoleh JPT yang memiliki integritas dan kompetensi serta memiliki kesiapan untuk menduduki JPT," kata Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Ahmad Juhri. (*/wiz)

Rudi Kaget Dengar Rencana PHK

► Langsung Panggil Kadisnaker Batam

BATAM, TRIBUN - Wali Kota Batam Muhammad Rudi sempat tersentak ketika mendapat informasi beberapa perusahaan akan tutup. Imbasnya sekitar seribuan karyawan akan dirumahkan.

Rudi menyampaikan informasi tersebut saat menghadiri acara

peresmian Gedung Kantor Dewan Pendidikan Batam di Sekupang, Kamis (12/4) siang. "Hal ini masih informasi yang saya dapatkan, tapi belum tahu pasti perusahaan apa. Mengenai hal ini, Kadisnaker akan saya panggil," katanya.

Rudi juga menyampaikan, tang-

gung jawab Pemko Batam hanya mengontrol investasi. Sementara masalah investasi ada di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kamis sore, Rudi menggelar rapat tertutup bersama Kadisnaker Batam, Rudi Sakyakirti. Hampir 30 menit pertemuan berlangsung.

Usai pertemuan, Rudi Sakyakirti mengatakan, yang sebenarnya terjadi bukan tutup. Perusahaan kemungkinan mengurangi karyawan karena sepi order.

"Ini yang perlu diluruskan. Tapi

pengurangan karyawan. Mereka itu kan punya perencanaan, contohnya tahun ini tak tercapai orderannya, ya mereka akan mengurangi yang kontrak. Mungkin kontraknya tidak diperpanjang. Kalau banyak orderan lagi, ya direkrut lagi," ucap dia.

Rudi Sakyakirti mengatakan pula jumlahnya juga bukan ribuan orang. Pengurangannya akan dilakukan bertahap kalau memang orderannya tidak terpenuhi. Mungkin bulan ini sebanyak 20 orang yang tidak diperpanjang kontraknya.

"Berdasarkan informasi hanya satu bukan beberapa perusahaan. Namun kalau orderan banyak, mereka tetap akan pertahankan," ucapnya.

Rudi Sakyakirti berharap dalam proses ini, perusahaan tersebut masih mendapat orderan lagi sehingga bisa mempertahankan tenaga kerjanya.

"Inilah yang perlu kita sikapi. Soal nama perusahaannya saya tak bisa katakan. Itu rahasia. Pastinya yang bergerak di bidang elektronik," katanya.

Tak hanya itu, Rudi Sakyakirti juga mengungkapkan saat ini tidak semua perusahaan mendapatkan banyak order. Ini yang sering terjadi dalam bidang elektronik.

"Kemudian dalam bidang *shippyard* atau *offshore* ada juga yang akan mendapatkan pekerjaan tahun ini. Semoga saja bisa terealisasi," ujarnya.

Ia mengakui salah satu perusahaan kemungkinan akan mengambil karyawan sebanyak 2.000-an orang tahun ini. Dan masyarakat tak perlu khawatir.

Sementara Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Pengusahaan (PTSP BP) Batam, Ady Soegiharto mengatakan belum mendapat informasi kabar rencana penutupan perusahaan.

"Kami belum tahu. Memang kemarin ada rencana perusahaan yang bergerak di industri garam akan tutup. Itu terkait kebijakan dari pemerintah soal garam industri, tapi sudah ditangani (tak jadi tutup). Kalau yang terbaru, belum ada informasi," kata Ady kepada *Tribun*,

Ia pun meminta waktu un-

tuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut.

"Kalau elektronik biasanya di Batamindo. Bentar ya, saya kroscek dulu," ujarnya.

Ady juga mengatakan, jika perusahaan akan berhenti beroperasi, salah satu prosedur yang mesti dilaluinya yakni melapor ke Disnaker. Itu terkait tenaga kerja yang terdampak.

Sedangkan pengurusan di PTSP BP Batam terkait administrasi akhir untuk penutupan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

"Kita di administrasi akhir. Soal rencana perusahaan tutup ini, kita sudah klarifikasi dengan Batamindo. Infonya tidak ada," kata Ady. (rus/als/wie)



TRIBUN/ROMA SIANTURI

DENGAR PENDAPAT - Komisi I DPRD Kota Batam saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kelurahan Tiban Lama Kecamatan Sekupang, Kamis (12/4).

Warga Resah Takut Rumah Digusur

BATAM, TRIBUN - Lagi-lagi komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat Kelurahan Tiban Lama terkait masalah lahan.

"Saya di sini untuk membantu warga di Tiban. Tolong lah kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam jangan terlalu berpihak kepada pengusaha. Masyarakat sudah 25 tahun tinggal di sini. Hanya 70 rumahnya kalau di totalikan. Tapi kenapa BP Batam tetap harus ngotot," kata Tim Kuasa untuk warga RT01 RT3 RW07 Jonson Sibuea, dalam rapat tersebut, Kamis (12/4).

Dalam RDP ini perusahaan tidak menghadiri rapat. Namun hanya memberikan surat berhalangan kepada Komisi I.

"Sebenarnya saya mengecewakan pihak PT BMS tak hadir. Namun hanya memberikan surat. Pimpinannya sedang di Jakarta dan minta dijadwal ulang rapatnya," ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto yang memimpin RDP tersebut.

Sementara itu Camat Sekupang, M. Arman mengatakan, masalah Tiban Kampung ini sebenarnya sudah lama. Adanya PT yang akan masuk di wilayah tinggal mereka, yaitu PT BMS. Lurah sudah melakukan mediasi namun selalu tidak berhasil.

"Mediasi pertama buntu. Tidak dipedulikan oleh BP

Batam. Pertemuan itu mundur karena yang punya hak dan kewenangan adalah BP Batam. Namun akan dijadwalkan kembali berdasarkan kesiapan waktu bagian lahan. Masyarakat mengikut saja, karena tak ada alasan lagi," paparnya.

Arman melanjutkan ada pertemuan kedua, hadir lah BP Batam. Namun saat itu ada surat pemanggilan pengadilan kepada warga, sementara akan ingin memediasi kepada warga. Keputusan pada waktu itu hanya Penijauan Lapangan dan meninjau titik.

"Sampai dititik N, itu sudah masuk ke wilayah pemukiman warga. Kita hanya melihat dulu titiknya. Saya memberikan 2 opsi kepada perusahaan. Titik M digeser dan ditarik lurus, pemukiman tidak akan terkena. Namun tak ada keputusan karena pihak BMS yang hadir orang lapangan. Kami harap ada solusi dari kegiatan ini,"katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang dan Pengolahan Lahan BP Batam, Vesli mengatakan mereka dari pihak pengadaan lahan. Kapasitas hanya pengalokasian lahan saja.

"Terkait BMS memang pernah mengajukan permohonan dan legal,"ucapnya

Ia menambahkan terkait dengan penataan BP Batam sudah memiliki rencana sendiri yaitu memberikan sertifikat HPL nya kepada masyarakat Tiban terse-

but. Masalah penataan ini tak akan selesai atau over laping.

Pantauan Tribun tanggapan dari pihak BP Batam di bantah oleh beberapa warga. Mereka tetap bertahan meminta kejelasan atas lahan tersebut. Sehingga pada rapat berikutnya berkas-berkas resmi terkait perizinan perusahaan akan ditunjukkan.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Fauzan mengakui persoalan lahan ini bukan persoalan yang kali pertama namun sangat banyak. BP Batam yang mempunyai hak, tetapi disaat memberikan izin lalu penggusuran dan lain-lain diberikan kepada pengusaha.

"Saya juga menyesalkan pemerintah, Camat juga tak bisa sampai memberikan kesepakatan. Saya rasa pemerintah juga mempunyai tim, kawasan ekonomi khusus. Pemerintah melakukan koordinasi ke BP Batam bagaimana. Seperti tidak ada koordinasi. Pimpinan jadi perlu adanya sistem. Ini perlu juga dipikirkan," paparnya.

Rapat ditutup oleh Budi, dan akan ada rapat berikutnya. Warga Tiban berharap persoalan ini dapat terselesaikan.

"Saya galau loh mbak mikirkan ini. Sampai tak bisa tidur. Saya takut kehilangan rumah kami," ujar seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya. (rus)

Pemko

Siapkan

Sanksi Pecat

- ▶ Bila MWD Dijadikan Tersangka
- ▶ Kasus Pencurian oleh Oknum Satpol PP

BATAM, TRIBUN - Pemerintah Kota Batam menyiapkan sanksi kepada MWD (44) seorang Satpol PP yang tertangkap tim buser Polresta Barelang dan Unit Reskrim Batam Kota karena terlibat pencurian.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus yang dialami anak buahnya ke pihak kepolisian. MWD merupakan pegawai di kantor Kecamatan Lubuk Baja.

Menurut Amsakar, apabila nanti MWD sudah ditetapkan tersangka maka proses sanksi akan diterapkan kepadanya.

"Nanti setelah pegawai ASN Satpol PP itu divonis dan ditetapkan sebagai tersangka, kita juga akan memproses perbuatannya dengan memberikan sanksi," kata Amsakar, Kamis (12/4).

Amsakar menjelaskan, sanksi paling berat yang

akan diberikan yakni pemecatan. Sanksi ini akan dikeluarkan karena dianggap tidak terpuji dan tidak menjadi contoh bagi masyarakat.

"Makanya saya selalu sampaikan kepada para pegawai Pemko agar berperilaku baik dan menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Karena perilaku pegawai selalu menjadi referensi bagi warga. Nah ketika hal yang seperti ini terjadi, masyarakat jadi menilai tidak baik. Inilah yang harus diperhatikan para pegawai agar menjadi teladan di lingkungan masyarakat," ujarnya.

Amsakar mengatakan, faktor ekonomi diduga menjadi penyebab MWD melakukan kejahatan. "Ya karena masalah ekonomi dan gaji yang dia terima tidak cukup informasinya, sehingga dia khilaf dan nekat melakukan perbuatan itu," jelasnya.

Sementara itu saat disinggung apakah ada pembelaan

dari Pemerintah Kota Batam atas perbuatan yang dilakukan pegawai ASN Satpol PP tersebut, Amsakar menyampaikan, untuk tindak pidana dan korupsi tidak ada pembelaan mengenai bantuan hukum.

"Kalau kasusnya seperti itu, sudah berat dan itu tidak akan ada pembelaan yang kita berikan. Dia harus tanggung resiko yang dia lakukan," kata Amsakar saat menghadiri peresmian gedung kantor Dewan Pendidikan Kota Batam.

Wakasad Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, memang ditemukan alat isap bong di rumahnya. Namun polisi belum melakukan test urine.

"Walaupun kita pastikan dia pemakai namun tentunya harus ada pemeriksaan dulu. Pasti ada kesana. Karena kita menemukan beberapa bonk di sana," sebut Andri, Kamis (12/4) siang. (als/koe)